

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang**. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, Januari 2025

Kepala,



Yoyok Fibrianto, SE,S.Pi,M.Pi
NIP. 19740225 200212 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	39
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	49
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	56
F. Pengungkapan Penting Lainnya	61
VI. Lampiran dan Daftar	68

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang** yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II **Tahun Anggaran 2024** sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, Januari 2025

Kepala,



Yoyok Fibrianto, SE,S.Pi,M.Pi

NIP. 19740225 200212 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja dengan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada **Tahun Anggaran 2024** adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp74.012.725,00** atau mencapai **49 persen** dari estimasi pendapatan sebesar **232.000.000,00**. Sedangkan pada **Tahun Anggaran 2023** sebesar **Rp142.190.000,00** atau mencapai **61 persen** dari estimasi pendapatan-LRA sebesar **232.000.000,00**

Realisasi Belanja Negara pada **Tahun Anggaran 2024** adalah sebesar **Rp5.604.371.042,00** atau mencapai **95 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp5.887.307.000,00**. Sedangkan pada **Tahun Anggaran 2023** sebesar **Rp7.475.647.698,00** atau mencapai **98 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp7.625.274.000,00**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per **31 Desember 2024**.

Nilai Aset Per **31 Desember 2024** dicatat dan disajikan sebesar **Rp11.471.590.308,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar

Rp86.980.454,00, Aset Tetap (neto) sebesar **Rp11.384.609.854,00**, Piutang Jangka Panjang (neto) **Rp. 0,00** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp0,00**. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp14.310.983,00** dan **Rp11.457.279.325,00**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan/LO, beban, Surplus/Defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus atau defisit/LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan – LO untuk periode sampai dengan **31 Desember 2024** adalah sebesar **Rp72.330.000,00**. Sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar **Rp(5.737.821.646,00)**. sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai **Rp(5.665.491.646,00)**. Kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa masing-masing defisit sebesar **Rp(20.292.275,00)** dan **Rp0** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp(5.685.783.921,00)**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal **01 Januari 2024** adalah sebesar **Rp11.538.222.429,00** dikurangi defisit-LO sebesar **Rp(5.685.783.921,00)** dan ditambah transaksi antar entitas sebesar **Rp5.609.028.322,00** kenaikan/penurunan ekuitas **Rp(80.943.104,00)** sehingga ekuitas akhir pada Tanggal **31 Desember 2024** adalah senilai **Rp11.457.279.325,00**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal **31 Desember 2024**, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN KIPM PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE TAHUNAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN
31 DESEMBER 2023**

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Anggaran	TA 2023 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
A. PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	150,000,000	74,012,725	49.34	142,190,078
Jumlah Pendapatan		150,000,000	74,012,725	49.34	142,190,078
B. BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	3,588,750,000	3,476,364,491	96.87	4,120,485,461
Belanja Barang	B.4	2,298,557,000	2,128,006,561	92.58	3,328,162,237
Belanja Modal	B.5	-	-	#DIV/0!	27,000,000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		5,887,307,000	5,604,371,052	95.19	7,475,647,698

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

STASIUN KIPM PALEMBANG

NERACA

PER 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.1.4	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.1.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.1.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	86,980,454	49,537,472
JUMLAH ASET LANCAR		86,980,454	49,537,472
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	6,261,306,000	6,261,306,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	5,045,918,638	5,506,901,033
Gedung dan Bangunan	C.2.3	5,355,361,197	5,355,361,197
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	349,141,000	349,141,000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	94,595,500	116,570,500
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(5,721,712,481)	(6,084,351,004)
JUMLAH ASET TETAP		11,384,609,854	11,504,928,726
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan	C.3	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG			
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.4	-	-
Aset Lain-Lain	C.4.1	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.2	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA			
JUMLAH ASET		11,471,590,308	11,554,466,198
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.5	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	14,310,983	16,243,769
Utang yang Belum ditagihkan	C.5.2	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.3	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		14,310,983	16,243,769
JUMLAH KEWAJIBAN		14,310,983	16,243,769
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	11,457,279,325	11,538,222,429
JUMLAH EKUITAS		11,457,279,325	11,538,222,429

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

STAIUN KIPM PALEMBANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Cat.	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	72,330,000	138,639,000
JUMLAH PENDAPATAN		72,330,000	138,639,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3,476,364,491	4,120,485,461
Beban Persediaan	D.3	137,958,026	257,228,478
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,033,493,841	1,846,354,610
Beban Pemeliharaan	D.5	540,410,368	557,183,126
Beban Perjalanan Dinas	D.6	378,818,548	701,191,059
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	170,776,372	390,330,305
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		5,737,821,646	7,872,773,039
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5,665,491,646)	(7,734,134,039)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(21,054,500)	(41,003,700)
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		(920,500)	(3,551,000)
Beban Penjualan Aset Non Lancar		(21,975,000)	(44,554,700)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		762,225	78
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(762,225)	(78)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	(20,292,275)	(41,003,622)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5,685,783,921)	(7,775,137,661)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN KIPM PALEMBANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DAN 31 DESEMBER 2023**

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	11,979,902,470	12,595,244,48
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(759,228,145)	(7,458,008,19
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	
SELISIH REVALUASI ASET		-	
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALU	E.3.5	-	
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		733,457,620	6,842,666,17
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(265,770,525)	(615,342,01
EKUITAS AKHIR	E.5	11,714,131,945	11,979,902,47

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang

*Profil dan
Kebijakan
Teknis*

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sesuai dengan PERMENKP 48 PERMENKP Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkedudukan di Jalan Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam Palembang, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/ wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Melalui peran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan

mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya dilakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, dan perubahan organisasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang berkomitmen dengan :

VISI:

“Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi, dan Terpercaya”.

MISI :

“Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi

dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

TUJUAN :

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut ;
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan;
4. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan yang optimal dan bermutu;
5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan terkait dengan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penegakan hukum di bidang karantina ikan;
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang yang kompeten dan professional;
7. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang;

8. Terwujudnya *good governance & clean government* di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang;
9. Terkelolanya anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang secara optimal.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun KIPM Palembang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun KIPM Palembang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun KIPM Palembang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang

bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun KIPM Palembang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun KIPM Palembang adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran

Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun KIPM Palembang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya *automatic adjustment* (blokir anggaran) sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut:

Jenis Belanja	JUMLAH ANGGARAN	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH BLOKIR
Pendapatan		
Pendapatan Jasa Karantina	1,700,000	1,700,000
Pendapatan, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	148,300,000	148,300,000
Jumlah Pendapatan	150,000,000	150,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	3,588,750,000	3,588,750,000
Belanja Barang	2,298,557,000	2,298,557,000
Belanja Bantuan Sosial		
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	5,887,307,000	5,887,307,000

Realisasi

Pendapatan

Rp74.012.725,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode TA 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp74.012.725,00 atau mencapai 49 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00. Realisasi Pendapatan Stasiun KIPM Palembang tidak tercapai target karena adanya Permen KP No 35 tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Realisasi Pendapatan Stasiun KIPM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPA TA 2024

Jenis Pendapatan	2024		%
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	1,700,000	-	-
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi	148,300,000	72,330,000	48.77
Pendapatan dari penjualan peralatan mesin	-	920,500	-
Penerimaan Kembali PegawaiTAYL	-	2,000	-

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 terdapat penurunan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp(2.420.00,00) atau 8.84persen. Perbandingan realisasi PNBPA Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Perbandingan Realisasi PNBP TA. 2024 dan TA. 2023

URAIAN JENIS PNBP	REALISASI PNBP (Rp)		NAIK (TURUN) %	
	Semester II TA. 2024	Semester II TA. 2023	Jumlah	%
Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN	920,500	3,551,000	(2,630,500)	100.00
Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL	2,000	78	1,922	0.00
Pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi	72,330,000	136,219,000	(63,889,000)	100.00
Pendapatan Denda	760,225	-	760,225	-
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	2,420,000	(2,420,000)	-100.00
Jumlah	74,012,725	142,190,078	(2,420,000)	-47.95

B.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara Rp5.604.371.042,00

Realisasi Belanja SKIPM Palembang TA 2024 adalah sebesar Rp5.604.371.042,00 atau 95 persen dari anggaran belanja sebesar Rp5.887.307.00,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per jenis belanja TA 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3,588,750,000	3,476,364,491	96.87
Belanja Barang	2,298,557,000	2,128,006,551	92.58
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Jumlah	5,887,307,000	5,604,371,042	95.19

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2023, terdapat penurunan realisasi belanja sebesar (25,03) persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu tahun anggaran 2024 lebih kecil dari pagu tahun anggaran 2023, dikarenakan tahun anggaran 2024 tidak terdapat pagu untuk belanja modal.

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2024 dan TA. 2023

URAIAN	REALISASI NETTO (Rp)		NAIK/ TURUN	
	TA. 2024	TA. 2023	Jumlah (Rp)	%
Belanja Pegawai	3,476,364,481	4,120,485,461	(644,120,980)	(15.63)
Belanja Barang	2,128,006,551	3,328,162,237	(1,200,155,686)	(36.06)
Belanja Modal	-	27,000,000	(27,000,000)	(100.00)
Jumlah	5,604,371,032	7,475,647,698	(1,871,276,666)	(25.03)

Belanja

Pegawai

Rp3.476.364.491,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 adalah sebesar Rp3.476.364.491,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja dan realisasi belanja Pegawai TA 2024 disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA. 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	2,046,610,978	#DIV/0
Belanja Lembur	148,676,000	147,092,000	98.9
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1,706,350,000	1,611,226,390	94.4
Jumlah Belanja	1,855,026,000	3,804,929,368	205.1

Apabila dibandingkan dengan realisasi Semester II Tahun Anggaran 2024, terdapat kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar Rp108.114.688 atau (3,13) persen karena adanya pegawai pindah dan Kenaikan Grade Tunjangan Kinerja. Perbandingan realisasi belanja pegawai Semester II Tahun

2022 dan Semester II Tahun 2021 disajikan tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA. 2024 dan Semester II TA. 2023

URAIAN	Realisasi Netto (Rp)		NAIK (TURUN)
	TA.2024	TA.2023	Jumlah (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,046,610,978	2,104,575,940	(57,964,962)
Belanja Lembur	214,801,200	192,210,000	22,591,200
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1,859,073,283	1,767,195,620	91,877,663
Jumlah Belanja	4,120,485,461	4,063,981,560	56,503,901

Belanja

Barang

*Rp2.128.006.551,
00*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA.2024 adalah sebesar Rp2.128.006.551,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2024 disajikan pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Perbandingan Belanja Barang TA.2024

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	765,075,000	713,726,106	93.29
Belanja Barang Non Operasional	62,121,000	42,131,077	67.82
Belanja Jasa	292,805,000	279,569,444	95.48
Belanja Pemeliharaan	550,593,000	540,410,368	98.15
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	454,503,000	378,818,548	83.35
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	173,460,000	173,351,008	99.94
Jumlah Belanja	2,298,557,000	2,128,006,551	92.58

Apabila dibandingkan dengan realisasi Semester II TA. 2023 terdapat penurunan sebesar (Rp107.291.350,00) atau 7,79 persen karena terdapat blokir pagu anggaran TA. 2024 yang mengakibatkan beberapa kegiatan tertunda, dan penyerapan anggaran menjadi rendah. Perbandingan realisasi Belanja Barang Semester II Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2023 disajikan pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	Realisasi Netto (Rp)		Naik/ Turun	
	TAHUN 2024	TAHUN 2023	Jumlah	%
Belanja Barang Operasional	713,726,106	713,726,106	0	-
Belanja Barang Non Operasional	42,131,077	42,131,077	0	-
Belanja Jasa	173,351,008	173,351,008	0	-
Belanja Pemeliharaan	540,410,368	540,410,368	0	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	378,818,548	378,818,548	0	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	173,351,008	173,351,008	0	-
Jumlah Belanja	2,021,788,115	2,021,788,115	0	0.00

Belanja Modal
Rp0,00

B.5 Belanja Modal

Terdapat Realisasi Belanja Modal Tahunan Tahun 2024 sebesar Rp0,00

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI		Naik (Turun)
	2024	2023	Jumlah
Lemari	0	15,000,000	(15,000,000)
Meja	0	12,000,000	(12,000,000)
Jumlah Belanja Bersih	0	27,000,000	(27,000,000)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Realisasi belanja modal tanah tidak mengalami kenaikan/penurunan.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Intrakomptabel dan ekstrakomptabel TA. 2024.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2024. Sedangkan TA. 2023 adalah sebesar Rp0,00. disajikan pada tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA.2024 2024 dan TA. 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI		Naik/ Turun	
	2023	2022	Jumlah	%
Gedung Tempat Kerja	0	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	0	-
Tugu/ Tanda Batas	0	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA.2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak ada realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA.2024.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0,00*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA.2024 dan TA.2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

*Rp86.980.454,
00*

C.1 Aset Lancar

Nilai aset lancar per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing – masing sebesar Rp86.980.454,00 dan Rp49.537.472,00 . Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian aset lancar per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 14
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No	Aset Lancar	TA.2024	TA.2023
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Belanja dibayar dimuka(prepaid)	-	-
3	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-
4	Persediaan	86.980.454	49,537,472
5	Persediaan yang belum diregister	-	-
Jumlah		-	49,537,472

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

Tabel 15
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024

No	Keterangan	31 Des 2024
1	Uang di Rekening Bank	-
2	Saldo UP (Uang tunai di brankas bendahara)	-
3	Kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan	-
Jumlah		-

Kas di

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan Rp0,00 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0,00. Hal ini disebabkan oleh PNBP langsung disetorkan ke kas negara, jadi bendahara tidak menerima uang untuk disetorkan Kembali.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00 **C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang PNBP Rp0,00 **C.1.4 Piutang PNBP**
Saldo Piutang PNBP per 31 Desember 2024 dan per 30 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Bagian Lancar Tagihan **C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*TP/TGR
Rp0,00* Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan per 31
Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.
Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum
diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh
tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak
tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
TPA Rp0,00* **C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-
masing adalah sebesar Rp0,00. Bagian Lancar TPA
merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal
pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak Rp0,00* **C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan
Pajak**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per
31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah
sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0.00* **C.1.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan
per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar
Rp0.00,-.Belanja dibayar di muka merupakan hak yang
masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai
akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh
namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,00

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan Rp 86.980.454,00

C.1.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp86.980.454,00 dan Rp Rp49.537.472,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

Jenis	31Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	86,980,454	49,537,472
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Jumlah	86,980,454	49,537,472

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0.00*

C.1.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 sebesar Rp0.00.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0,00*

C.1.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan per 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0,00*

C.1.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Aset Tetap
Rp11.384.809.
854,00*

C.2 Aset Tetap

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing – masing sebesar Rp11.384.809.854,00 dan Rp11.504.928.726,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan operasional entitas.

Tanah

C.2.1 Tanah

Rp

6.261.306.000

,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun KIPM Palembang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.6.261.306.000,00

Rincian Tanah Semester II

Tahun 2024

No	Luas	Lokasi	Nilai BMN	Hasil Penilaian
1	701 m2	JL.Mangku bumi Palembang	320,000,000	1,706,892,000
2	847m2	JL.Akses Bandara In't SMB II Palembang	308,000,000	2,044,721,000
3	590m2	JL.Akses Bandara In't SMB II Palembang	267,270,000	1,413,687,000
4	541m2	JL.Karantina Palembang	190,432,000	1,095,956,000
Jumlah			1,085,702,000	6,261,256,000

Peralatan dan

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Mesin Rp

5.045.918.638

,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Semester II Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah Rp5.045.918.638,00 dan Rp5.506.901.033,00 . Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023		5,867,289,558
Mutasi tambah:		
Pembelian		0
Transfer Masuk		0
Reklas Masuk		0
Mutasi kurang:		0
Transfer Keluar		-
Penghentian Penggunaan		-
Saldo per 31 Desember 2023		5,867,289,558
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022		0
Nilai Buku per 31 Desember 2022		5,867,289,558

*Gedung dan
Bangunan
Rp5.355.361.197
,00*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp5.335.361.197,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	5,355,361,197
Mutasi tambah:	
Pengembangan melalui KDP	-
Perolehan melalui KDP	-
Jaringan Listrik Gedung dan Bangunan	-
Revaluasi Gedung dan Bangunan	-
Saldo per 31 Desember 2023	5,355,361,197
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	5,355,361,197

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp349.141.000,
00*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp349.141.000,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 September 2023	349,141,000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2023	349,141,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	349,141,000

Rincian asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp94.595.500,0
0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp94.595.500,00 dan Rp116.570.500,00 Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2024.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,00*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan per 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(5.721.712.
481,00)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(5.721.712.481,00) dan Rp(6.084.351.004,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5,867,298,558	5,029,843,204	837,446,354
2	Gedung dan Bangunan	5,355,361,197	634,570,304	4,720,790,893
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	349,141,000	204,482,909	14,498,091
4	Aset Tetap yang tidak digunakan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		11,571,800,755	5,868,896,417	5,572,735,338

*Aset Tak Berwujud
Rp0,00*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp0,00*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0,00*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp0.00 dan Rp0.00,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0,00*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp14.310.983,
00*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp14.310.983,00 dan Rp16.243.769,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga ini

berupa, beban langganan listrik bulan desember 2024 sebesar Rp10.898.329,00, beban langganan air bulan desember 2022 sebesar Rp1.147.544,00 beban langganan telpon sebesar Rp1.435.096,00 bulan desember 2024 dan beban internet sebesar Rp.2.762.800,00 bulan desember 2023.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0,00*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp0,00*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas
Rp11.457.279.
325,00*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.457.279.325,00 dan Rp11.538.222.429,00 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus(Defisit) dari Kegiatan Operasional (Rp5.685.783.921,00)

D.1 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing – masing sebesar minus (Rp5.685.783.921,00) dan (Rp7.775.137.661,00). Defisit tersebut merupakan selisih antara pendapatan sebesar Rp72.330.000,00 dikurangi beban (Rp5.737.821.646,00)

Pendapatan PNBPNP Rp74.012.725,00

D.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp74.012.725,00 dan Rp142.190.078,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II Tahun 2024 dan Semester II 2023

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Karantina	2,420,000	1,965,000	23.16
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	136,219,000	153,331,000	100.00
Jumlah	138,639,000	155,296,000	(10.73)

Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi.

Beban Pegawai Rp3.476.364.491,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.476.364.491,00 dan Rp4.120.485.461,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturasn perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	30 Desember 2023	30 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji tunjangan PNS	2,045,552,523	2,104,575,940	(2.80)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1,859,215,438	1,767,195,620	5.21
Beban Lembur	215,717,500	192,210,000	12.23
Jumlah	4,120,485,461	4,063,981,560	1.39

Beban

Persediaan

Rp137.958.026,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp137.958.026,00 dan Rp257.228.478,00 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

URAIAN	Semester II TH 2023	Semester II TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	256,744,478	213,508,433	20.25
Beban Persediaan Bahan Baku	484,000	199,150,533	(99.76)
Jumlah	257,228,478	412,658,966	(37.67)

*Beban
Barang dan
Jasa Rp
1.033.493.8
41,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.033.493.841,00 dan Rp1.846.354.610,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester II Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun Semester II Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2023

Uraian	Semester II Tahun 2023	Semester II Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Listrik	154,527,181	131,021,255	17.94
Beban Langganan Telepon	25,264,091	24,350,941	3.75
Beban Langganan Air	35,019,985	29,465,360	18.85
Beban Sewa	67,000,000	102,764,704	(34.80)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	31,000,000	(100.00)
Beban Jasa Konsultan	0	0	0.00
Beban Jasa Profesi	22,800,000	12,250,000	100.00
Beban Jasa lainnya	147,795,000	165,647,000	(10.78)
Beban Bahan	324,297,800	223,590,700	45.04
Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	8,160,000	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	13,340,000	51,960,000	(74.33)
Beban Keperluan Perkantoran	801,264,053	723,349,588	10.77
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	56,050,000	64,702,630	(13.37)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	3,599,000	3,591,000	0.22
Beban Honor Operasional Satker	127,055,500	130,115,000	(2.35)
Beban Barang Operasional Lainnya	58,682,000	64,225,750	(8.63)
Belanja Modal BLU	0	0	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1,500,000	0	0.00
Beban Barang Operasional - Penanganan Covid	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	210,000	(100.00)
Jumlah	1,846,354,610	1,766,403,928	4.53

Beban Pemeliharaan Rp 540.410.368,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp540.410.368,00 dan Rp557.183.126,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Semester II Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Semester II Tahun 2023	Semester II Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	241,594,172	243,476,720	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	315,359,954	271,722,698	16.06
Beban persediaan untuk pemeliharaan	0	791,150	-100.00
Beban persediaan suku cadang	0	21,619,833	-100.00
Jumlah	556,954,126	537,610,401	3.60

Beban

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Rp., 378.818.548,00

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp378.818.548,00 dan Rp701.191.059,00,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan perjalanan dinas ini disebabkan oleh blokir anggaran. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Semester II Tahun 2024	Semester II Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	452,067,609	230,694,685	95.96
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	75,800,000	68,470,000	10.71
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	95,700,000	0	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	77,623,450	0	#DIV/0!
Jumlah	701,191,059	299,164,685	134.38

Beban

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Barang untuk

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31

Diserahkan kepada Masyarakat Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Stasiun KIPM Palembang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Beban Bantuan Sosial
Rp0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp 170.776.372,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp170.776.372,00 dan Rp390.330.305,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester II Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2024 dan Tahun*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Semester II TH 2023	Semester II TH 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	149,207,181	366,558,015
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	60,344,314	117,847,248
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	4,473,294	8,946,587
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-	-
Jumlah Penyusutan	214,024,789	493,351,850
Beban Amortisasi Software	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	214,024,789	493,351,850

2023

*Beban
Penyisihan
Piutang
Tak
Tertagih
Rp0,00*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester II Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Defisit dari
Kegiatan
Non
Operasion
al
(Rp20.292.275,00)*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Semester II Tahun 2024 sebesar (Rp20.292.275,00) dan Semester II Tahun 2023 sebesar (Rp.41,003.622,00)

Pos Luar **D.12 Pos Luar Biasa**

Biasa Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.
Rp0,00

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas **E.1 Ekuitas Awal**

Awal Nilai ekuitas awal per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.538.222.429,00 dan Rp11.979.902.470,00
Rp11.538.222.429,00

Defisit LO **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Rp(5.685.783.921,00) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(5.685.783.921,00) dan Rp(7.775.137.661,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

an Nilai Aset Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2023 2022 adalah sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
Rp0

Koreksi

E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi

Atas

Reklasifikasi

si

Rp312.500,

00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Semester II Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(312.500,00) dan Rp0.00.

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi

Aset Tetap

Rp0.00

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Aset

Tetap Non

Revaluasi

Rp3.875.005,0

0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp(3.875.005) dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Lain-Lain

Rp0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Rp5.609,0 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31
28.322,00 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.609.028.322,00 dan Rp7.333.457.620,00 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(142,190,078)
Ditagihkan ke Entitas Lain	7,475,647,698
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	7,333,457,620

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp(74.012.725,00) sedangkan DKEL sebesar Rp18.699.995,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan

aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp97.370.000,00 terdiri dari:

Detail transaksi Transfer Masuk dapat disajikan sebagai berikut :

AKUN	URAIAN AKUN	Kuantitas	Nilai
117111	Barang Konsumsi	-	-
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Total			-

E.4.3Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.

Ekuitas

E.5 Ekuitas Akhir

Akhir

*Rp11.457.279.
32500*

Nilai Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 dan Nilai Ekuitas akhir per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.457.279.325,00 dan Rp11.538.222.429,00

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

No	No Rekening	Nama Rekening	Saldo Per 31 Desember 2023
1	8100125674811000	BPG.014.Stasiun KIPM Palembang	0

- o Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun KIPM Palembang Nomor : B.002/08.0/OT-220/I/2024 tanggal 04 Januari 2024 tentang Tim Pengelolaan Keuangan Tahun 2024 Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Stasiun KIPM Palembang, Pejabat Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut :

	Nama	Jabatan
1	Yoyok Fibrianto,SE,S.Pi,M.Pi	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Yoyok Fibrianto,SE,S.Pi,M.Pi	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Engla Asri,SE,MM	Pejabat Penandatanganan SPM
4	Agung Kurniawan,A.Md	Bendahara Pengeluaran
5	Mega Deswita	Bendahara Penerimaan

- o Pada tanggal 15 Januari 2024 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang pertama dengan nomor revisi : DIPA-032.13.2.567481/2024 Revisi Pertama Alasan dilakukan revisi adalah Pengurangan Pagu DIPA ke Badan Karantina Indonesia

- Pada tanggal 25 Januari 2024 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang kedua dengan nomor revisi : DIPA-032.13.2.567481/2024 Revisi Kedua Alasan dilakukan revisi adalah Blokir Anggaran.
- Pada tanggal 16 Februari 2024 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang ketiga dengan nomor revisi: DIPA-032.13.2.567481/2024 Revisi Ketiga Alasan dilakukan revisi adalah Revisi Halaman III DIPA.
- Pada tanggal 7 Maret 2024 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang keempat dengan nomor revisi: DIPA-032.13.2.567481/2024 Revisi Keempat Alasan dilakukan revisi adalah Penambahan Gaji PPPK
- Pada tanggal 03 Mei 2024 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang kelima dengan nomor revisi: DIPA-032.13.2.567481/2024 Revisi Kelima Alasan dilakukan revisi adalah Pagu Minus
- Pada tanggal 28 Mei 2024 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang keenam dengan nomor revisi: DIPA-032.13.2.567481/2024 Revisi Keenam Alasan dilakukan revisi adalah Halaman III DIPA